

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 3 TAHUN 1949

PEGAWAI HAK PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN. Peraturan tentang
hak mengangkat dan memberhentikan
pegawai Negeri.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

Perlu mengadakan peraturan tentang penyerahan mengangkat dan memberhentikan pegawai Negeri;

Membaca:

Usul yang telah direncanakan oleh Panitia Gaji dan kedudukan pegawai negeri;

Mendengar:

Dewan Menteri;

Mengingat:

Peraturan pemerintah Nomor 21 tahun 1948, Penetapan Presiden Nomor 1 tahun 1949, Undang-undang Nomor 19 tahun 1948 dan pasal 4 Undang-undang Dasar Republik Indonesia;

Memutuskan:

Menetapkan Peraturan sebagai berikut:

PERATURAN TENTANG PENYERAHAN HAK MENGANGKAT DAN MEMBERHENTIKAN PEGAWAI NEGERI.

Pasal 1

Pada azasnya, pegawai negeri diangkat, diberhentikan untuk sementara waktu, diberhentikan dari pekerjaan dan diberhentikan dari jabatan negeri oleh Presiden hak ini dapat diserahkan kepada Pembesar-pembesar bawahanya.

Pasal 2

Dengan mengindahkan ketentuan dalam pasal 4, pegawai Negeri baik yang tetap, maupun yang tidak tetap, diangkat, diberhentikan untuk sementara waktu, diberhentikan dari pekerjaan dan diberhentikan dan jabatan Negeri:

- a. Oleh menteri, termasuk Perdana Menteri, bagi mereka yang dipekerjakan dalam lingkungan kekuasaannya;
- b. Oleh Ketua Komite Nasional Indonesia Pusat, bagi mereka yang dipekerjakan pada kantornya;
- c. Oleh Ketua Dewan Pertimbangan Agung, bagi mereka yang dipekerjakan pada kantornya;
- d. Oleh ketua Badan Pemeriksa Keuangan Negara, bagi mereka yang dipekerjakan pada Badan tersebut;
- e. Oleh Sekretaris Negara, bagi mereka yang dipekerjakan pada kantornya.

Pasal 3

- (1) Pembesar-pembesar yang ditentukan pada pasal 2 dapat menyerahkan haknya kepada pembesar bawahnya, mengenai pegawai Negeri yang digaji menurut P. G. P. 1948 Golongan IV kebawah.
- (2) Penyerahan hak termaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap pemberitahuan dari jabatan Negeri dalam sebutan "tidak dengan hormat".

Pasal 4

Dalam arti pegawai Negeri sebagai dimaksudkan dalam pasal 2 di kecualikan:

- a. Mereka yang memangku jabatan Negeri yang digaji menurut P.G.P. 1948 Golongan VI ruang d keatas;
- b. Mereka yang memangku jabatan berlaku ketentuan-ketentuan mengenai pengangkatan dan pemberhentian termaksud dalam Undang-Undang No. 19 tahun 1948.

pasal 5

Pengangkatan, pemberitahuan untuk sementara waktu, pemberhentian dari pekerjaan dan pemberhentian dari jabatan Negeri yang ditetapkan sebelum peraturan ini berlaku dan tidak sesuai dengan peraturan ini, dianggap telah ditetapkan oleh pembesar-pembesar yang berhak menurut peraturan ini.

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada hari diumumkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 9 Agustus 1948.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SOEKARNO.

Diumumkan
pada tanggal 9 agustus 1949.
Sekretaris Negara
ttd.
A. G. PRINGGODIGDO.

Menteri
yang diserahi urusan pegawai
Negeri,
ttd
KOESMAN.